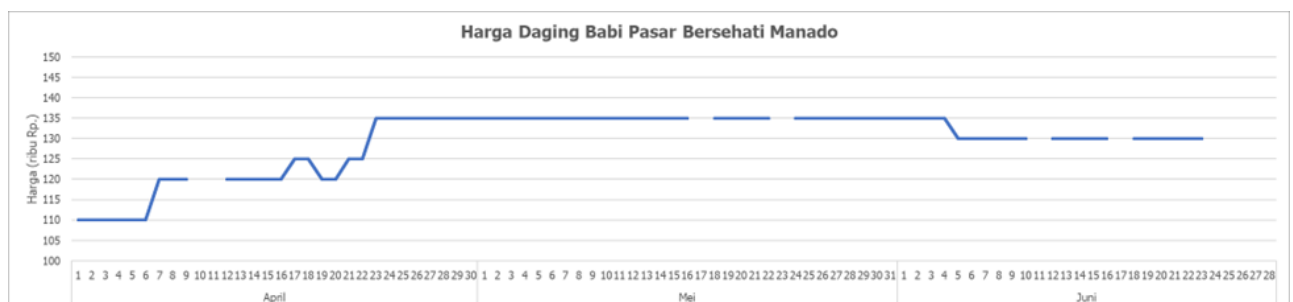


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Pada Triwulan II 2024, berdasarkan data dari BPS Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara mengalami inflasi baik secara tahunan (*yoy*), bulanan (*mtm*) dan pada tahun berjalan (*ytd*). Secara tahun ke tahun berdasarkan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Manado, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan terjadi kenaikan dari 102,88 pada Juni 2023 menjadi 107,43 pada Juni 2024 atau mengalami inflasi 4,42%. Sedangkan secara bulan ke bulan dan tahun berjalan tingkat inflasi masing-masing sebesar 0,47% dan 0,58%.
- Pada daerah masuk dalam cakupan IHK Sulawesi Utara, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 7,86% (*yoy*) dan 1,81% (*mtm*), diikuti oleh Kabupaten Minahasa Selatan dengan inflasi 7,53% (*yoy*) dan 0,38% (*mtm*). Inflasi terendah terjadi di Kota Manado sebesar 2,65% (*yoy*) dan 0,05% (*mtm*). Sementara untuk Kota Kotamobagu mengalami inflasi sebesar 4,49% (*yoy*) dan 0,84% (*mtm*).
- Kenaikan harga *yoy* di Triwulan II ini mayoritas disumbang oleh kelompok makanan minuman dan tembakau (12,15%), perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,37%) dan penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,15%). Secara khusus, komoditas yang memberikan andil inflasi *yoy* adalah cabai rawit (1,09%), daging babi (1,00%), beras (0,73%), daun bawang (0,22%), dan tomat (0,21%). Sementara itu, komoditas yang menahan inflasi dengan andil terbesar adalah ikan malalugis/sorihi (-0,14%), ikan selar/tude (-1,10%), minyak goreng (-0,08%), ikan deho (-0,08%) dan air kemasan (-0,05%).
- Secara bulan ke bulan, komoditas yang menyumbang inflasi terbesar adalah cabai rawit (0,33%), tomat (0,07%), daging babi (0,06%), cabai merah (0,05%) dan lemon (0,03%) sedangkan komoditas yang menahan inflasi terdalam adalah beras (-0,10%), ikan malalugis/ikan sorihi (-0,03%), bawang putih (-0,03%), ikan deho (-0,02%) dan ikan cakalang/ikan sisik (-0,02%).



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah periode ini disebabkan penurunan pasokan yang dipengaruhi oleh musim hujan. Curah hujan yang tinggi pada musim hujan mengakibatkan banyak tanaman mengalami gugur bunga. Selain itu kelembaban yang tinggi pada musim ini membuat tanaman rentan terkena hama dan penyakit. Hal-hal ini membuat produktivitas tanaman cabai menurun.

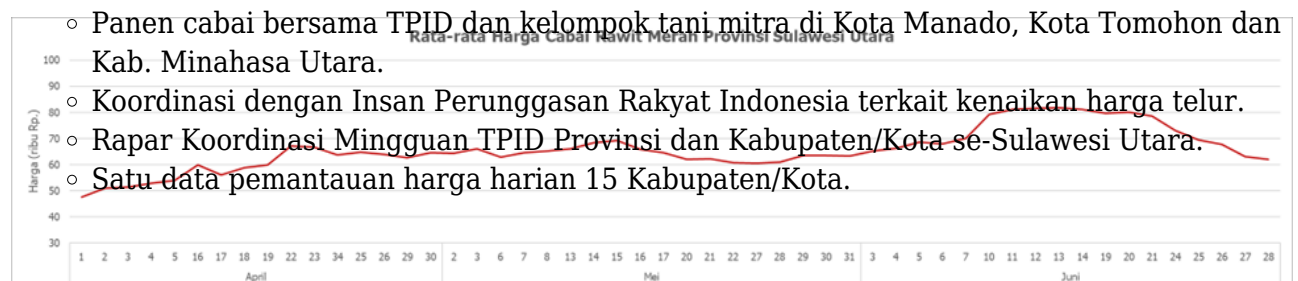
Untuk komoditas tomat, terjadi penurunan pasokan karena petani harus memenuhi kewajiban dagang yang sudah terjalin dengan pihak dari daerah luar Sulawesi Utara. Pada triwulan II ini terpantau arus keluar komoditas tomat dengan volume kurang lebih 100 ton per bulan ke daerah Maluku dan Papua.

Selama triwulan II, komoditas daging babi menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Sulawesi Utara. Secara yoy andil inflasi daging babi cukup besar karena tahun lalu harga daging babi masih di kisaran Rp. 55 ribu sampai Rp. 60 ribu dibanding tahun ini yang mencapai Rp. 130.000. Kenaikan ini disebabkan pasokan yang masih kurang akibat kondisi peternakan babi yang masih belum pulih dari serangan virus *African Swine Fever* yang terutama diderita oleh peternak kecil sementara konsumsi daging babi masyarakat Sulut tergolong besar.

Sementara itu inflasi lemon diakibatkan oleh periode berbuah yang telah melewati musim dimana produktivitas tanaman berada pada puncaknya sehingga stok di pasar berkurang.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi April 2024



Upaya pengendalian inflasi Mei 2024

- Panen cabai bersama TPID dan kelompok petani mitra di Kab. Minahasa.

Sister Cluster Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dengan petani champion Bawang Merah dan Padi di Malang.

- Penandatanganan Komitmen PATUA Mitra TPID untuk memprioritaskan penyaluran hasil panen di dalam wilayah Sulut dan mendukung program kerja TPID, seperti GPM dan operasi pasar.
- KAD Probolinggo-Manado skema *B-to-B* untuk komoditas Bawang Merah;
- Rapar Koordinasi Mingguan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota.

Upaya pengendalian inflasi Juni 2024

- Rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi Prov. Sulut, 10 Juli 2024;
- Penandatanganan KAD antara Kota Manado dengan Kab. Pohuwato untuk komoditas bawang merah, cabai rawit/rica, dan tomat (barito) pada 23 Juli
- High Level Meeting TPID Kab. Kepulauan Sangihe pada 14 Juli dan penanaman Padi pada 20 Juli 2024;
- Pengendalian ekspetasi melalui diseminasi kebijakan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pada program Mozaik Indonesia di RRI Sulut;
- Panen Poktan Palembang (Cabai Merah, Tomat) di Kab. Minahasa;
- Penandatanganan KAD antara Kab. Minahasa Tenggara dan Kab. Bolaang Mongondow Utara pada 12 Juli.
- Pengadaan 750 ekor indukan Babi dari luar daerah oleh PemProv bekerjasama dengan pengusaha Babi.
- Rangkaian GPM dihari Pengucapan di Kab Minsel, Minut, Mitra, Manado, Bitung dan Kotamobagu.
- Rapar Koordinasi Mingguan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan kerja sama yang efektif dalam mengawasi serta mengevaluasi langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi. Ini mencakup pengawasan terhadap produksi dan pasokan di tahap awal, serta distribusi barang-barang pokok dan barang strategis lainnya ke konsumen.

Sebagai upaya memberikan ketersediaan pasokan, Bank Indonesia bersama TPID Sulut bersinergi dengan Bapanas telah mengimplementasikan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) komoditas cabai rawit sebanyak 2 ton pada 12 Juni 2024 sebagai respon atas naiknya cabai rawit menjelang HBKN Idul Adha. FDP dilakukan dengan jembatan udara dari Bandara Sultan Hasanuddin ke Bandara Sam Ratulangi menggunakan fasilitas dari Bapanas. Transportasi dari Bandara Sam Ratulangi menuju lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) menggunakan fasilitas dari Bank Indonesia. Selanjutnya, dilakukan sidak pasar dan GPM di Lapangan Tikala, Manado pada 13 Juni 2024 menggunakan cabai rawit yang didatangkan dari Makassar.

Untuk mengendalikan pasokan dan harga daging babi di pasar, TPID melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengkaji program mendatangkan produk ternak babi dari luar Sulawesi Utara. Tahap pertama adalah menyusun dasar hukum yaitu Surat Edaran Nomor 524/24.3641/Sekr-Distanak tentang Pemasukan Ternak Babi, Daging

Babi, dan Semen Babi ke Sulawesi Utara. Surat ini memuat persyaratan memasukan ternak babi ke Sulawesi utara. Langkah lain yang dilaksanakan adalah melakukan kunjungan ke Provinsi Bali untuk mengkaji kerja sama mendatangkan produk ternak babi baik berupa ternak hidup atau daging beku. Inisiatif ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Charoen Pokhphan di Bali. Sampai akhir Juni program ini sudah sampai pada tahap analisis risiko. Ini untuk menentukan keamanan ternak dari penyakit karena selain ASF babi juga rentan terkena penyakit kolera dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Setiap minggu, TPID Provinsi Sulawesi Utara terus mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan TPID Kabupaten/Kota untuk memantau perkembangan harga di pasar serta mendiskusikan strategi pengendalian inflasi yang telah dan akan dilaksanakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang berkaitan dengan pengendalian inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Perbaikan Rantai Distribusi dan Pasokan: Meningkatkan koordinasi distribusi komoditas penting seperti cabai, tomat, dan daging babi. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan pasokan karena cuaca dan dampak penyakit ternak. Untuk mengatasi ini, perlu adanya intensifikasi kerja sama antarprovinsi atau penggunaan skema transportasi lintas daerah, seperti Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang sudah diterapkan pada cabai rawit.
- Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan: Peningkatan produksi lokal, terutama cabai dan daging babi, perlu menjadi prioritas. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan subsidi pupuk dan bibit unggul, serta pengembangan program pertanian berkelanjutan. Selain itu, mendatangkan bibit ternak babi dari luar daerah harus disertai dengan langkah pencegahan penyebaran penyakit ternak.
- Penguatan Pengawasan Harga dan Operasi Pasar: Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) terbukti efektif mengatasi spekulasi harga. Pengawasan yang lebih ketat terhadap harga di pasar, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan, sangat diperlukan untuk mencegah lonjakan harga.
- Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan: Pemanfaatan dana desa untuk pengendalian inflasi juga bisa menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah daerah dapat mendorong alokasi yang lebih besar untuk program pengendalian inflasi, seperti yang telah diinstruksikan dalam rakor TPID tahun ini.